

Masa Depan Ekonomi Indonesia di Tengah Fragmentasi Global

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Infografik Komprehensif Satu Halaman



Dunia bergerak dari globalisasi efisiensi menuju globalisasi risiko: perdagangan, teknologi, energi, dan investasi semakin dipengaruhi geopolitik.

1 APA ITU FRAGMENTASI GLOBAL?

- Proteksionisme dan perang dagang
- Rivalitas geopolitik AS-Tiongkok
- Disrupsi rantai pasok global
- Pembatasan teknologi strategis
- Volatilitas energi dan komoditas
- Pergeseran dari "just-in-time" ke "just-in-case"



2 SNAPSHOT EKONOMI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi 2025	Pertumbuhan Q1-2026 (yoy)	Inflasi Mei 2026	BI-Rate Juni 2026	Surplus neraca dagang Jan-Mar 2026
5,11%	5,61%	3,08%	5,75%	US\$5,55 miliar



Stabil, tetapi menghadapi tekanan eksternal dan kebutuhan transformasi struktural.

3 RISIKO UTAMA



- Permintaan ekspor melemah
- Volatilitas harga komoditas
- Tekanan nilai tukar dan biaya energi
- Ketergantungan impor migas
- Persaingan menarik investasi global
- Risiko kepercayaan pasar dan tata kelola

4 PELUANG STRATEGIS



- Hilirisasi mineral dan industri baterai
- Pasar domestik yang besar
- Relokasi rantai pasok ke ASEAN
- Ekonomi digital dan AI
- Transisi energi hijau
- Posisi Indonesia sebagai *middle power*

5 AGENDA TRANSFORMASI



6 TIGA SKENARIO MASA DEPAN

A. RESILIENSI TERKELOLA



Stabilitas terjaga, pertumbuhan sekitar 5%, reformasi berjalan bertahap.

B. PERTUMBUHAN TERTEKAN



Energi mahal, investasi tertahan, tekanan fiskal dan pasar meningkat.

C. TRANSFORMASI STRATEGIS



Indonesia naik kelas melalui inovasi, industrialisasi hijau, dan produktivitas.



ARAH YANG DIINGINKAN



PESAN KUNCI: Di tengah fragmentasi global, masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan beralih dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai tambah, teknologi, ketahanan, dan kesejahteraan berkelanjutan.

*Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Ekonomi Indonesia di Tengah
Fragmentasi Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

25 Juni 2026

MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH FRAGMENTASI GLOBAL

Abstrak

Artikel ini membahas masa depan ekonomi Indonesia dalam konteks fragmentasi global yang semakin nyata. Fragmentasi global merujuk pada melemahnya integrasi ekonomi dunia akibat rivalitas geopolitik, proteksionisme, perang dagang, disrupsi rantai pasok, konflik regional, pembatasan teknologi, ketidakpastian energi, serta meningkatnya penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat kekuasaan politik. Bagi Indonesia, fragmentasi global menghadirkan risiko sekaligus peluang. Risiko muncul melalui perlambatan permintaan ekspor, volatilitas harga komoditas, tekanan nilai tukar, ketidakpastian investasi, biaya energi yang lebih tinggi, dan meningkatnya kompetisi antarnegara dalam menarik industri strategis. Namun, peluang juga terbuka melalui diversifikasi rantai pasok, hilirisasi sumber daya alam, pasar domestik yang besar, posisi geopolitik Indonesia sebagai kekuatan menengah, potensi ekonomi digital, transisi energi, ekonomi hijau, dan ASEAN sebagai kawasan pertumbuhan. Artikel ini berargumen bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada stabilitas makroekonomi dan ekspor komoditas, melainkan harus dibangun melalui transformasi struktural yang memperkuat produktivitas, kualitas sumber daya manusia, kapasitas teknologi, industrialisasi hijau, tata kelola negara, perlindungan sosial, dan diplomasi ekonomi strategis. Indonesia perlu bergerak dari ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis nilai tambah,

pengetahuan, inovasi, dan ketahanan. Dalam konteks fragmentasi global, strategi pembangunan Indonesia harus bersifat adaptif: tidak terjebak dalam blok geopolitik tertentu, tetapi aktif membangun posisi sebagai negara penghubung, produsen strategis, pasar besar, dan pusat inovasi kawasan.

Kata kunci: *ekonomi Indonesia, fragmentasi global, geoeconomic fragmentation, hilirisasi, rantai pasok, geopolitik, ASEAN, industrialisasi, energi, ekonomi digital, ketahanan ekonomi, pembangunan berkelanjutan.*

1. Pendahuluan: Dunia yang Tidak Lagi Terintegrasi Secara Polos

Selama beberapa dekade, globalisasi dipahami sebagai proses integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan bebas, investasi lintas negara, mobilitas modal, rantai pasok global, transfer teknologi, dan pembentukan lembaga multilateral. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengambil manfaat dari ekspor, investasi asing langsung, pariwisata, remitansi, dan integrasi ke dalam sistem produksi global. Dalam narasi lama, semakin terbuka suatu negara terhadap perdagangan dan investasi, semakin besar peluang pertumbuhan ekonominya.

Namun, memasuki dekade 2020-an, narasi itu berubah. Dunia tidak kembali sepenuhnya ke model proteksionisme tertutup, tetapi juga tidak lagi berjalan dalam semangat hiperglobalisasi. Yang muncul adalah fragmentasi global: perdagangan makin dipengaruhi oleh politik; teknologi makin dibatasi oleh keamanan nasional; energi menjadi instrumen geopolitik; rantai pasok dipindahkan berdasarkan pertimbangan risiko; negara-negara besar membangun kebijakan industri strategis; dan modal global menjadi lebih sensitif terhadap stabilitas politik, tata kelola, dan kredibilitas fiskal.

IMF menyebut fragmentasi geoekonomi sebagai risiko yang dapat mengganggu perdagangan, migrasi, arus modal, difusi teknologi, dan penyediaan barang publik global. Artinya, fragmentasi bukan hanya masalah tarif atau ekspor-impor, tetapi perubahan mendasar dalam cara ekonomi dunia bekerja. ([IMF](#))

Pada 2026, tekanan global semakin kompleks. IMF memperkirakan pertumbuhan global 2026 sebesar 3,1% dan 2027 sebesar 3,2% dalam konteks konflik Timur Tengah, kenaikan harga komoditas, ekspektasi inflasi yang menguat, dan kondisi keuangan yang lebih ketat. ([IMF](#)) Bank Dunia bahkan memperkirakan pertumbuhan global 2026 melambat menjadi 2,5% akibat kenaikan harga energi, inflasi baru, dan ketidakpastian kebijakan. ([World Bank](#))

Indonesia berada di tengah pusaran ini. Di satu sisi, ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dari 5,03% pada 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Pada Triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan, meskipun secara kuartalan terkontraksi 0,77%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Di sisi lain, tekanan eksternal dan domestik mulai terasa melalui inflasi, nilai tukar, biaya energi, pasar modal, serta persepsi investor.

BPS mencatat inflasi tahunan Mei 2026 sebesar 3,08%, masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia tetapi menunjukkan kenaikan dari bulan sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Bank Indonesia pada 17–18 Juni 2026 menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, dengan Deposit Facility 4,75% dan Lending Facility 6,50%, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan. ([Bank Indonesia](#))

Kondisi ini memperlihatkan dilema utama ekonomi Indonesia: bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah dunia yang lebih tidak pasti, sambil tetap mempercepat transformasi struktural? Apakah Indonesia akan tetap menjadi eksportir komoditas dan pasar konsumsi besar, atau naik kelas menjadi pusat produksi bernilai tambah, inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau? Apakah Indonesia dapat memanfaatkan fragmentasi global sebagai

peluang diversifikasi rantai pasok, atau justru menjadi korban volatilitas komoditas dan aliran modal?

Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menempatkan ekonomi Indonesia dalam empat lensa: fragmentasi global, ketahanan domestik, transformasi struktural, dan keadilan pembangunan.

2. Memahami Fragmentasi Global: Dari Globalisasi Efisiensi ke Globalisasi Risiko

Fragmentasi global tidak berarti dunia berhenti berdagang. Perdagangan masih berjalan, investasi masih mengalir, perusahaan multinasional masih beroperasi, dan teknologi masih menyebar. Namun, prinsip dasarnya berubah. Dalam era hiperglobalisasi, perusahaan mencari lokasi produksi paling murah, paling efisien, dan paling terhubung. Dalam era fragmentasi, negara dan perusahaan mulai bertanya: apakah rantai pasok aman? apakah pemasok berada di negara yang secara politik dapat dipercaya? apakah teknologi strategis dapat jatuh ke pesaing? apakah komoditas penting dapat digunakan sebagai alat tekanan?

Ada pergeseran dari *just-in-time* menuju *just-in-case*. Efisiensi tetap penting, tetapi ketahanan menjadi semakin penting. Perusahaan tidak lagi hanya menghitung biaya produksi terendah, melainkan juga risiko geopolitik, gangguan logistik, sanksi, konflik, keamanan data, dan stabilitas regulasi. Negara-negara besar mendorong *reshoring*, *nearshoring*, *friend-shoring*, dan kebijakan industri untuk mengamankan sektor strategis seperti semikonduktor, baterai, farmasi, energi bersih, pangan, dan teknologi pertahanan.

Bagi Indonesia, fragmentasi ini memiliki dua wajah. Pertama, fragmentasi dapat merugikan karena menurunkan permintaan global, memperbesar volatilitas harga, dan mengganggu rantai pasok. Kedua, fragmentasi dapat membuka peluang karena perusahaan global mencari alternatif lokasi produksi di luar pusat lama. Jika Indonesia mampu menyediakan stabilitas,

infrastruktur, SDM, energi bersih, regulasi yang kredibel, dan ekosistem industri, Indonesia dapat menarik investasi baru.

Namun, peluang tersebut tidak otomatis. Banyak negara bersaing merebut relokasi industri: Vietnam, India, Thailand, Malaysia, Meksiko, Turki, dan negara-negara Eropa Timur. Indonesia tidak cukup hanya memiliki pasar besar dan sumber daya alam. Indonesia harus memiliki kepastian regulasi, logistik efisien, tenaga kerja produktif, insentif yang cerdas, dan hubungan diplomatik yang luwes.

3. Posisi Awal Indonesia: Tumbuh Stabil, tetapi Belum Cukup Transformasional

Ekonomi Indonesia memiliki beberapa kekuatan fundamental. Pertama, pasar domestik besar. Dengan jumlah penduduk yang besar, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan. Kedua, sumber daya alam melimpah, mulai dari nikel, batu bara, sawit, tembaga, bauksit, gas, perikanan, hutan, dan potensi energi terbarukan. Ketiga, posisi geografis strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta berada di pusat ASEAN. Keempat, stabilitas pertumbuhan sekitar 5% selama bertahun-tahun menunjukkan daya tahan makroekonomi.

Namun, stabilitas 5% juga menyimpan persoalan. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mengurangi ketimpangan, memperluas kelas menengah, dan menjadi negara berpendapatan tinggi, pertumbuhan sekitar 5% saja mungkin tidak cukup. Indonesia memerlukan akselerasi produktivitas. Pertumbuhan harus naik bukan karena konsumsi jangka pendek atau belanja publik semata, melainkan karena produktivitas, investasi berkualitas, teknologi, ekspor bernilai tambah, dan kualitas SDM.

OECD memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia 2026 sebesar 4,7% dan 2027 sebesar 5,0%, dengan tekanan dari biaya energi, ketidakpastian kebijakan, konsumsi dan investasi yang terbebani, serta pasar tenaga kerja yang melemah. OECD juga memperkirakan ekspor bersih tidak memberi

kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena permintaan global yang lebih lemah atas sebagian komoditas ekspor Indonesia akan diimbangi oleh impor yang melemah akibat moderasi permintaan domestik. ([OECD](#))

Ini memperlihatkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan melakukan transformasi. Pertumbuhan stabil adalah modal, tetapi bukan tujuan akhir. Jika Indonesia hanya mempertahankan pola lama—konsumsi domestik, ekspor komoditas, investasi berbasis SDA, dan upah relatif murah—maka Indonesia berisiko terjebak dalam pertumbuhan menengah. Jika Indonesia mampu mengubah struktur ekonominya, fragmentasi global dapat menjadi momentum naik kelas.

4. Ekspor, Komoditas, dan Kerentanan Eksternal

Salah satu ciri ekonomi Indonesia adalah peran besar komoditas dalam ekspor. Batu bara, sawit, besi-baja, nikel, produk mineral, karet, pulp, dan produk pertanian tetap penting. Komoditas memberi devisa, penerimaan negara, dan lapangan kerja. Namun, ketergantungan pada komoditas membuat ekonomi rentan terhadap harga global, permintaan China, kebijakan energi dunia, serta sentimen lingkungan.

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 surplus US\$0,95 miliar, melanjutkan surplus 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus tersebut didukung komoditas nonmigas, sementara sektor migas tetap defisit. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Pada Januari–Maret 2026, ekspor Indonesia mencapai US\$66,85 miliar, naik 0,34% dibanding 2025, sedangkan impor mencapai US\$61,30 miliar, naik 10,05%; neraca perdagangan kuartal tersebut surplus US\$5,55 miliar, dengan surplus nonmigas US\$10,63 miliar dan defisit migas US\$5,08 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data ini menunjukkan dua hal. Pertama, sektor eksternal masih menjadi penyangga penting. Kedua, defisit migas dan kenaikan impor menunjukkan bahwa pertumbuhan industri dan konsumsi tetap membutuhkan energi

dan barang modal yang sebagian besar masih berasal dari luar. Dalam dunia yang terfragmentasi, ketergantungan energi dan input impor dapat menjadi sumber tekanan.

Komoditas strategis juga makin politis. Nikel, tembaga, aluminium, batu bara, sawit, dan mineral kritis tidak lagi dilihat hanya sebagai barang dagangan, tetapi sebagai elemen keamanan ekonomi. Negara-negara besar membutuhkan mineral untuk baterai, kendaraan listrik, pertahanan, dan teknologi hijau. Indonesia dapat memanfaatkan posisi ini, tetapi harus berhati-hati agar tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku dalam bentuk baru.

Hilirisasi adalah jawaban awal, tetapi hilirisasi harus diperluas dari pengolahan fisik menjadi transformasi produktif. Indonesia perlu memastikan bahwa hilirisasi menghasilkan transfer teknologi, keterampilan tenaga kerja, rantai pasok lokal, riset nasional, standar lingkungan, energi bersih, dan nilai tambah domestik. Jika tidak, hilirisasi hanya menjadi ekstraktivisme yang lebih mahal dan lebih kompleks.

5. Fragmentasi Teknologi dan Tantangan Produktivitas

Fragmentasi global tidak hanya terjadi pada barang dan energi, tetapi juga teknologi. Dunia mulai terbagi dalam ekosistem teknologi yang lebih terpisah: standar semikonduktor, sistem operasi, komputasi awan, AI, 5G/6G, keamanan siber, pembayaran digital, satelit, dan data. Negara-negara besar membatasi ekspor teknologi tertentu, mengatur investasi asing di sektor strategis, dan mengawasi aliran data lintas batas.

Bagi Indonesia, ini menimbulkan tantangan produktivitas. Untuk naik kelas, Indonesia membutuhkan teknologi. Namun, jika teknologi dunia semakin dibatasi oleh blok geopolitik, akses Indonesia terhadap teknologi maju dapat bergantung pada kecakapan diplomasi, kualitas regulasi, dan kemampuan membangun kapasitas lokal.

Indonesia tidak harus menjadi produsen semua teknologi. Tetapi Indonesia harus menguasai kemampuan memilih, menyerap, mengadaptasi, dan mengembangkan teknologi. Dalam ekonomi modern, keunggulan tidak hanya berasal dari sumber daya alam, tetapi dari *absorptive capacity*: kemampuan menyerap pengetahuan. Negara yang hanya membeli mesin tanpa membangun manusia akan tetap bergantung. Negara yang membangun teknisi, insinyur, peneliti, manajer, dan ekosistem inovasi dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

AI menjadi contoh penting. Pemerintah Indonesia dilaporkan menyiapkan integrasi AI dalam berbagai program utama, termasuk program makan gratis senilai sekitar US\$15 miliar, serta roadmap AI lintas kementerian dan daerah untuk 2026–2029. Rencana tersebut mencakup penggunaan AI dalam desain menu berbasis daerah, pemantauan keamanan pangan, prediksi permintaan, skrining kesehatan, dan kemungkinan sovereign AI fund, tetapi juga menghadapi tantangan infrastruktur dan kekurangan talenta AI. ([Reuters](#))

AI dapat menjadi pendorong produktivitas, tetapi juga dapat memperlebar ketimpangan. Jika AI hanya digunakan oleh perusahaan besar dan pemerintah pusat, sementara UMKM, sekolah, daerah, petani, nelayan, dan pekerja informal tertinggal, maka transformasi digital akan timpang. Karena itu, masa depan ekonomi Indonesia membutuhkan strategi AI inklusif: literasi AI, perlindungan data, penguatan kampus, pusat riset, komputasi nasional, regulasi etis, dan akses bagi UMKM.

6. Investasi, Kepercayaan Pasar, dan Tata Kelola

Dalam dunia fragmentasi, modal tidak hanya mencari return, tetapi juga kredibilitas. Investor menilai stabilitas makro, kepastian hukum, tata kelola, transparansi pasar, kualitas fiskal, independensi lembaga, dan konsistensi kebijakan. Indonesia membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur, energi, industri, digitalisasi, pendidikan, dan transisi hijau. Namun, investasi

hanya akan masuk secara berkelanjutan jika investor percaya bahwa aturan main jelas dan risiko politik dapat dikelola.

Pada Juni 2026, isu kepercayaan pasar menjadi penting karena MSCI menunda keputusan mengenai potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market ke frontier market hingga November 2026. Reuters melaporkan bahwa Indonesia diberi waktu tambahan untuk menerapkan reformasi seperti peningkatan syarat free float, penurunan ambang pengungkapan pemegang saham, katalog perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, pengetatan aturan modal, dan proses demutualisasi bursa. Reuters juga melaporkan bahwa potensi downgrade dapat memicu arus keluar hingga US\$13 miliar. ([Reuters](#))

Isu ini penting bukan hanya untuk pasar saham, tetapi untuk narasi tata kelola ekonomi. Fragmentasi global membuat modal lebih selektif. Jika pasar Indonesia dianggap kurang transparan, terlalu terkonsentrasi, atau dipengaruhi kebijakan yang tidak konsisten, maka biaya modal meningkat. Jika biaya modal meningkat, investasi produktif melemah. Jika investasi melemah, transformasi struktural tertunda.

Dengan demikian, reformasi pasar modal, transparansi kepemilikan, tata kelola BUMN, kepastian regulasi, dan kualitas kebijakan fiskal bukan isu teknis, melainkan syarat strategi pembangunan. Negara yang ingin aktif membentuk pasar harus terlebih dahulu dipercaya sebagai pembentuk aturan yang adil.

7. Fiskal, Subsidi, dan Ruang Kebijakan

Fragmentasi global sering meningkatkan tekanan fiskal. Harga energi naik, subsidi membengkak, nilai tukar melemah, biaya utang meningkat, dan kebutuhan belanja sosial bertambah. Indonesia menghadapi dilema: di satu sisi perlu menjaga daya beli masyarakat; di sisi lain perlu menjaga disiplin fiskal dan membiayai investasi jangka panjang.

Reuters melaporkan bahwa Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia 2026 melambat ke 5% di tengah tekanan fiskal, terutama akibat ekspansi belanja pemerintah dan kenaikan biaya subsidi energi setelah konflik Iran; proyeksi ini lebih rendah dari target pemerintah 5,4%–6%. Bank Dunia juga merekomendasikan pengurangan subsidi BBM secara bertahap dan pengalihan dukungan kepada 40% penduduk termiskin melalui bantuan tunai langsung. ([Reuters](#))

OECD juga menekankan bahwa efisiensi belanja publik dapat ditingkatkan melalui penargetan subsidi energi yang lebih baik kepada rumah tangga rentan. ([OECD](#)) Pesan kebijakannya jelas: subsidi luas yang tidak tepat sasaran dapat menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang lebih produktif.

Masa depan ekonomi Indonesia memerlukan reformasi fiskal yang berkeadilan. Reformasi subsidi harus dilakukan hati-hati karena menyangkut inflasi dan legitimasi sosial. Namun, dalam jangka panjang, subsidi energi yang dinikmati juga oleh kelompok mampu harus dialihkan ke perlindungan sosial adaptif, transportasi publik, energi bersih, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas UMKM.

Ruang fiskal juga perlu diperkuat melalui pajak yang lebih efektif, pengurangan kebocoran, digitalisasi administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan evaluasi insentif. Insentif investasi harus bersyarat: diberikan jika menciptakan nilai tambah, pekerjaan layak, transfer teknologi, dan kepatuhan lingkungan.

8. Energi: Titik Lemah dan Titik Transformasi

Energi adalah salah satu arena paling strategis dalam fragmentasi global. Konflik geopolitik dapat menaikkan harga minyak dan gas. Transisi energi global meningkatkan permintaan mineral kritis. Negara-negara besar

berlomba menguasai teknologi baterai, kendaraan listrik, energi terbarukan, hidrogen, dan jaringan listrik pintar.

Indonesia berada dalam posisi paradoksal. Indonesia adalah produsen batu bara besar, memiliki potensi energi terbarukan besar, tetapi masih bergantung pada impor minyak dan subsidi energi. Defisit migas dalam neraca perdagangan menunjukkan bahwa energi tetap menjadi kerentanan eksternal. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki peluang besar melalui nikel, panas bumi, surya, hidro, bioenergi, angin tertentu, dan karbon biru.

Masa depan energi Indonesia harus menjawab empat tujuan sekaligus: keamanan pasokan, keterjangkauan harga, transisi rendah karbon, dan industrialisasi hijau. Jika hanya mengejar energi murah dari fosil, Indonesia tertinggal dalam transisi hijau. Jika hanya mengejar energi bersih tanpa mempertimbangkan biaya sosial, masyarakat rentan dapat terbebani. Jika hanya mengeksplor mineral kritis tanpa membangun industri teknologi, Indonesia tetap berada di rantai nilai rendah.

Transisi energi harus menjadi misi nasional. Artinya, bukan sekadar menambah pembangkit energi terbarukan, tetapi membangun ekosistem: jaringan listrik, penyimpanan energi, industri komponen, riset baterai, pembiayaan hijau, pelatihan pekerja, perlindungan daerah penghasil batu bara, dan tarif yang adil.

9. ASEAN dan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Fragmentasi global membuat posisi kawasan semakin penting. ASEAN dapat menjadi penyangga bagi Indonesia karena kawasan ini relatif netral, memiliki pertumbuhan cukup baik, dan menjadi tujuan diversifikasi rantai pasok. Namun, ASEAN juga menghadapi persaingan internal. Vietnam kuat dalam manufaktur ekspor, Malaysia dan Singapura kuat dalam elektronik dan jasa modern, Thailand kuat dalam otomotif, dan Filipina kuat dalam jasa digital tertentu.

Indonesia perlu memainkan diplomasi ekonomi yang lebih aktif. Bukan hanya ikut perjanjian perdagangan, tetapi membentuk agenda kawasan: rantai pasok baterai ASEAN, konektivitas logistik, standar digital, pembayaran lintas batas, ketahanan pangan, ekonomi biru, dan transisi energi. Bank Indonesia mencatat pada Juni 2026 Indonesia dan China Selatan resmi terhubung melalui QR Code untuk transaksi yang lebih mudah, murah, dan cepat. ([Bank Indonesia](#)) Inisiatif pembayaran lintas batas seperti ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi masa depan tidak hanya lewat barang, tetapi juga infrastruktur digital dan keuangan.

Indonesia juga perlu menjaga politik luar negeri bebas aktif dalam bentuk ekonomi. Dalam dunia yang terbelah, Indonesia sebaiknya tidak menjadi satelit satu blok. Indonesia perlu menjadi *bridge economy*: terbuka terhadap berbagai mitra, tetapi dengan kepentingan nasional yang jelas. Diplomasi ekonomi harus menegosiasikan akses pasar, transfer teknologi, pembiayaan hijau, standar lingkungan yang adil, dan perlindungan tenaga kerja.

10. Hilirisasi: Dari Strategi Komoditas ke Strategi Produktivitas

Hilirisasi telah menjadi salah satu strategi utama Indonesia. Tujuannya adalah menghentikan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah domestik. Strategi ini masuk akal dalam dunia fragmentasi karena mineral strategis makin bernilai. Namun, hilirisasi dapat berhasil atau gagal tergantung desainnya.

Hilirisasi yang dangkal hanya memindahkan ekspor bahan mentah menjadi ekspor produk setengah jadi. Hilirisasi yang mendalam membangun kemampuan teknologi, desain, engineering, riset, pemasok lokal, dan merek. Hilirisasi yang adil membagi manfaat kepada daerah, pekerja, UMKM, dan masyarakat lokal. Hilirisasi yang hijau mengurangi emisi, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.

Indonesia perlu menghindari tiga risiko. Pertama, risiko rente: hilirisasi menjadi fasilitas bagi elite dan korporasi tertentu. Kedua, risiko lingkungan: peningkatan nilai tambah dilakukan dengan energi kotor dan kerusakan alam. Ketiga, risiko ketergantungan baru: Indonesia bergantung pada teknologi, modal, dan pasar luar negeri meskipun memproses bahan mentah di dalam negeri.

Karena itu, hilirisasi harus disertai *industrial policy conditionalities*: transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, kandungan lokal yang realistis, standar lingkungan, kewajiban riset, pajak adil, dan keterlibatan UMKM. Negara boleh memberi insentif, tetapi insentif harus menghasilkan nilai publik.

11. Pangan dan Inflasi: Fondasi Stabilitas Sosial

Dalam fragmentasi global, pangan menjadi isu strategis. Konflik, perubahan iklim, proteksionisme pangan, dan volatilitas energi dapat menaikkan harga pangan. Bagi Indonesia, stabilitas pangan penting karena pangan memengaruhi inflasi, kemiskinan, gizi, dan legitimasi sosial.

Inflasi Mei 2026 sebesar 3,08% masih terkendali, tetapi variasi wilayah cukup besar; BPS mencatat Papua Barat memiliki inflasi tertinggi 5,94% dan Lampung terendah 1,94%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Perbedaan wilayah ini menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya masalah moneter, tetapi juga logistik, distribusi, pasokan lokal, infrastruktur, dan tata kelola pasar.

Indonesia perlu membangun sistem pangan yang produktif, beragam, tahan iklim, dan adil. Ketahanan pangan bukan hanya beras, tetapi gizi, protein, hortikultura, ikan, pangan lokal, rantai dingin, logistik, data stok, dan daya beli. Fragmentasi global mengajarkan bahwa terlalu bergantung pada impor pangan strategis dapat berbahaya, tetapi swasembada yang tidak efisien juga mahal. Jalan tengahnya adalah ketahanan pangan berbasis produktivitas, diversifikasi, cadangan strategis, dan perdagangan yang cerdas.

12. Tenaga Kerja, SDM, dan Bonus Demografi

Masa depan ekonomi Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia. Bonus demografi dapat menjadi kekuatan jika penduduk usia produktif memiliki pendidikan, kesehatan, keterampilan, pekerjaan layak, dan akses teknologi. Namun, bonus demografi dapat berubah menjadi beban jika pasar kerja tidak mampu menciptakan pekerjaan produktif.

Fragmentasi global membuat kompetisi tenaga kerja lebih berat. Negara-negara akan menarik investasi dengan kualitas SDM, bukan hanya upah murah. Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan dasar, vokasi, perguruan tinggi, pelatihan kerja, literasi digital, dan kemampuan teknis. Industri baterai, semikonduktor tertentu, energi terbarukan, AI, logistik, kesehatan, dan manufaktur canggih membutuhkan SDM yang berbeda dari ekonomi komoditas.

Indonesia juga harus memperhatikan pekerjaan informal dan gig economy. Transformasi digital dapat menciptakan peluang, tetapi juga kerentanan. Pekerja platform memerlukan perlindungan sosial, transparansi algoritma, dan akses pelatihan. UMKM memerlukan pembiayaan, mentoring, akses pasar, dan teknologi.

Kebijakan SDM tidak boleh hanya berupa pelatihan pendek. Ia harus menjadi ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Sekolah, kampus, industri, pemerintah daerah, platform digital, dan lembaga sertifikasi harus terhubung.

13. Ekonomi Digital dan AI: Peluang Naik Kelas

Ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar karena pasar domestik besar, penetrasi mobile tinggi, UMKM banyak, dan generasi muda adaptif. Namun, ekonomi digital tidak otomatis meningkatkan produktivitas

nasional. Banyak aktivitas digital dapat bersifat konsumtif, promosi, atau perdagangan ulang, tanpa meningkatkan kemampuan produksi.

Untuk menjadikan digitalisasi sebagai mesin transformasi, Indonesia perlu mengarahkan digitalisasi ke sektor produktif: pertanian, perikanan, manufaktur, logistik, pendidikan, kesehatan, energi, pemerintahan, dan UMKM. Data harus digunakan untuk memperbaiki layanan publik dan produktivitas, bukan hanya untuk iklan dan konsumsi.

AI dapat membantu perencanaan pangan, prediksi cuaca, diagnosis kesehatan, personalisasi pembelajaran, efisiensi logistik, deteksi fraud, dan layanan publik. Namun, AI juga memerlukan infrastruktur komputasi, data berkualitas, talenta, etika, dan regulasi. Dalam dunia fragmentasi teknologi, Indonesia perlu membangun kedaulatan digital yang realistis: bukan menutup diri, tetapi memiliki kontrol atas data strategis, kapasitas komputasi tertentu, dan kemampuan audit.

14. Skenario Masa Depan Ekonomi Indonesia

Dalam 6–24 bulan ke depan, setidaknya ada tiga skenario besar.

Skenario 1: Resiliensi Terkelola

Dalam skenario ini, pemerintah berhasil menjaga stabilitas makro, inflasi terkendali, rupiah stabil, reformasi pasar modal berjalan, subsidi energi mulai lebih tepat sasaran, dan investasi hilirisasi tetap masuk. Pertumbuhan berada sekitar 5%, tidak spektakuler tetapi stabil. Ini adalah skenario moderat yang memungkinkan Indonesia membeli waktu untuk reformasi struktural.

Skenario 2: Pertumbuhan Tertekan

Dalam skenario ini, energi global tetap mahal, rupiah tertekan, suku bunga tinggi lebih lama, konsumsi melemah, investasi tertahan, dan pasar modal belum pulih. Pertumbuhan turun mendekati proyeksi OECD sekitar 4,7%.

Pemerintah masih menjaga belanja sosial, tetapi ruang fiskal menyempit. Ini bukan krisis besar, tetapi stagnasi penuh tekanan.

Skenario 3: Transformasi Strategis

Dalam skenario ini, Indonesia menggunakan fragmentasi global sebagai momentum. Pemerintah memperbaiki tata kelola, memperjelas kebijakan industri, mempercepat energi bersih, memperkuat SDM, membuka investasi berkualitas, dan membangun diplomasi ekonomi aktif. Hilirisasi naik kelas menjadi industrialisasi teknologi. Pertumbuhan dapat bergerak lebih tinggi secara berkelanjutan, bukan karena stimulus, tetapi karena produktivitas.

Pilihan skenario tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal. Kebijakan domestik, kualitas institusi, dan kepemimpinan ekonomi sangat menentukan.

15. Agenda Strategis Indonesia di Tengah Fragmentasi Global

Indonesia memerlukan agenda strategis yang menyatukan stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang.

Pertama, menjaga kredibilitas makroekonomi. Inflasi, nilai tukar, defisit fiskal, utang, dan stabilitas keuangan harus dijaga. Tanpa stabilitas, transformasi tidak memiliki fondasi.

Kedua, memperbaiki kualitas belanja negara. Subsidi luas perlu diarahkan menjadi perlindungan sosial tepat sasaran dan investasi produktif.

Ketiga, memperkuat industrialisasi berbasis nilai tambah. Hilirisasi harus disertai teknologi, riset, SDM, standar lingkungan, dan rantai pasok lokal.

Keempat, mempercepat transisi energi. Energi bersih harus diperlakukan sebagai strategi ekonomi, bukan hanya agenda lingkungan.

Kelima, membangun kapabilitas teknologi. AI, data, komputasi, siber, dan teknologi industri harus dikembangkan secara inklusif.

Keenam, memperluas pasar ekspor. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada sedikit pasar utama melalui ASEAN, India, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

Ketujuh, memperkuat UMKM. UMKM harus masuk rantai nilai, bukan hanya bertahan di sektor informal.

Kedelapan, memperkuat pangan dan logistik. Ketahanan pangan harus berbasis produktivitas, diversifikasi, data, dan distribusi.

Kesembilan, memperbaiki tata kelola investasi. Kepastian hukum, transparansi, dan reformasi pasar modal harus menjadi prioritas.

Kesepuluh, membangun diplomasi ekonomi bebas aktif. Indonesia harus menjadi penghubung, bukan pengikut blok.

16. Penutup: Indonesia sebagai Ekonomi Penghubung dan Ekonomi Berdaya Tahan

Fragmentasi global adalah kenyataan baru. Dunia tidak lagi sepenuhnya diatur oleh logika efisiensi pasar global, tetapi oleh kombinasi ekonomi, keamanan, teknologi, energi, dan geopolitik. Dalam dunia seperti ini, Indonesia tidak boleh pasif. Indonesia harus membaca fragmentasi sebagai risiko yang harus dikelola dan peluang yang harus dimanfaatkan.

Masa depan ekonomi Indonesia tidak cukup dijawab dengan target pertumbuhan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: pertumbuhan dari mana, untuk siapa, dengan teknologi apa, berbasis energi apa, dengan kualitas pekerjaan seperti apa, dan dengan ketahanan terhadap guncangan seperti apa? Indonesia memerlukan pertumbuhan yang lebih produktif, inklusif, hijau, dan berbasis pengetahuan.

Indonesia memiliki modal besar: pasar domestik, sumber daya alam, posisi geografis, demokrasi, ASEAN, populasi muda, dan potensi digital. Namun, modal itu dapat hilang jika tidak dikelola dengan visi. Fragmentasi global memberi pelajaran bahwa negara yang berhasil bukan hanya negara yang terbuka, tetapi negara yang cerdas memilih keterbukaan. Bukan negara yang menutup diri, tetapi negara yang mampu membangun kapasitas domestik. Bukan negara yang hanya menjual komoditas, tetapi negara yang menciptakan nilai tambah. Bukan negara yang tunduk pada blok, tetapi negara yang mampu bernegosiasi dengan semua pihak berdasarkan kepentingan nasional.

Indonesia masa depan harus menjadi ekonomi penghubung: menghubungkan ASEAN dengan dunia, sumber daya alam dengan teknologi, pasar domestik dengan ekspor, negara dengan masyarakat, pertumbuhan dengan keadilan, dan industrialisasi dengan keberlanjutan. Di tengah fragmentasi global, ketahanan ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan menata ulang fondasi pembangunan: dari komoditas ke kapabilitas, dari ekstraksi ke inovasi, dari konsumsi ke produktivitas, dan dari pertumbuhan semata ke kesejahteraan berkelanjutan.

Glossarium

ASEAN centrality

Prinsip bahwa ASEAN berperan sebagai pusat diplomasi dan kerja sama kawasan di Asia Tenggara.

Absorptive capacity

Kemampuan suatu negara, perusahaan, atau institusi untuk menyerap,

mengadaptasi, dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi dari luar.

Bridge economy

Ekonomi yang berperan sebagai penghubung antarblok, antarpasar, dan antarrantai pasok dalam dunia yang terfragmentasi.

Decoupling

Pemisahan sebagian hubungan ekonomi, teknologi, atau rantai pasok antara negara atau blok geopolitik.

Diversifikasi ekspor

Upaya memperluas jenis produk dan pasar tujuan ekspor agar tidak bergantung pada sedikit komoditas atau negara.

Fragmentasi global

Pelemahan integrasi ekonomi dunia akibat rivalitas geopolitik, proteksionisme, pembatasan teknologi, konflik, dan ketidakpastian kebijakan.

Friend-shoring

Strategi memindahkan rantai pasok ke negara-negara yang dianggap sebagai mitra politik atau keamanan yang lebih dapat dipercaya.

Geoeconomic fragmentation

Fragmentasi ekonomi yang didorong oleh pertimbangan geopolitik, keamanan nasional, dan strategi negara.

Hilirisasi

Pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Industrial upgrading

Proses naik kelas industri dari produksi sederhana menuju produksi bernilai tambah, teknologi, dan produktivitas lebih tinggi.

Just-in-case supply chain

Strategi rantai pasok yang menekankan ketahanan dan cadangan untuk menghadapi gangguan, bukan hanya efisiensi biaya.

Just-in-time supply chain

Strategi rantai pasok yang menekankan efisiensi, pengurangan persediaan, dan pengiriman tepat waktu.

Kebijakan industri

Intervensi strategis negara untuk membangun sektor tertentu, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional.

Ketahanan ekonomi

Kemampuan ekonomi bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan eksternal maupun internal.

Middle power

Negara berkekuatan menengah yang memiliki kapasitas diplomatik dan ekonomi untuk memengaruhi tata kelola regional atau global.

Nearshoring

Pemindahan produksi ke negara yang secara geografis lebih dekat dengan pasar utama.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau bernilai lebih tinggi dari input tertentu.

Reshoring

Pemindahan kembali aktivitas produksi dari luar negeri ke negara asal.

Rantai pasok global

Jaringan produksi, distribusi, dan perdagangan lintas negara yang menghasilkan barang dan jasa.

Transformasi struktural

Perubahan komposisi ekonomi dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas tinggi.

Daftar Pustaka

Format APA 7. DOI dicantumkan bila tersedia; beberapa buku dan laporan institusional tidak memiliki DOI.

Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). *Power and progress: Our thousand-year struggle over technology and prosperity*. PublicAffairs. DOI tidak tersedia.

Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L., & Hemous, D. (2012). The environment and directed technical change. *American Economic Review*, 102(1), 131–166. doi: 10.1257/aer.102.1.131

Aghion, P., Boulanger, J., & Cohen, E. (2015). Rethinking industrial policy. *Bruegel Policy Brief*. DOI tidak tersedia.

Aghion, P., Dewatripont, M., Du, L., Harrison, A., & Legros, P. (2015). Industrial policy and competition. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(4), 1–32. doi: 10.1257/mac.20120103

Aiyar, S., Chen, J., Ebeke, C., Garcia-Saltos, R., Gudmundsson, T., Ilyina, A., Kangur, A., Kunaratskul, T., Rodriguez, S., Ruta, M., Schulze, T., Soderberg, G., & Trevino, J. P. (2023). *Goeconomic fragmentation and the future of multilateralism*. IMF Staff Discussion Note SDN/2023/001. doi: 10.5089/9798400229046.006

Antràs, P. (2020). *De-globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age*. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 28115. doi: 10.3386/w28115

Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate increased by 25 bps to 5.75%: Strengthening stability, supporting economic growth*. Bank Indonesia. DOI tidak tersedia.

BPS-Statistics Indonesia. (2026). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent*. BPS-Statistics Indonesia. DOI tidak tersedia.

BPS-Statistics Indonesia. (2026). *Indonesia's economic growth in Q1-2026 was 5.61 percent (y-on-y)*. BPS-Statistics Indonesia. DOI tidak tersedia.

BPS-Statistics Indonesia. (2026). *Exports and imports of Indonesia in March 2026 reached USD22.53 billion and USD19.21 billion, respectively*. BPS-Statistics Indonesia. DOI tidak tersedia.

BPS-Statistics Indonesia. (2026). *The year-on-year headline inflation in May 2026 was recorded at 3.08 percent*. BPS-Statistics Indonesia. DOI tidak tersedia.

Gereffi, G. (2014). Global value chains in a post-Washington Consensus world. *Review of International Political Economy*, 21(1), 9–37. doi: 10.1080/09692290.2012.756414

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. doi: 10.1007/s10887-006-9009-4

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575. doi: 10.1073/pnas.0900943106

International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook, April 2026: Global economy in the shadow of war*. IMF. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Anthem Press. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. doi: 10.1093/icc/dty034

Mazzucato, M., & Penna, C. C. R. (2016). Beyond market failures: The market creating and shaping roles of state investment banks. *Journal of Economic Policy Reform*, 19(4), 305–326. doi: 10.1080/17487870.2016.1216416

OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Indonesia*. OECD Publishing. DOI tidak tersedia.

Rodrik, D. (2014). Green industrial policy. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(3), 469–491. doi: 10.1093/oxrep/gru025

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33. doi: 10.1007/s10887-015-9122-3

Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1, 12–33. doi: 10.1057/s42214-018-0001-4

Stiglitz, J. E. (2002). Information and the change in the paradigm in economics. *American Economic Review*, 92(3), 460–501. doi: 10.1257/00028280260136363

World Bank. (2026). *Global Economic Prospects*. World Bank. DOI tidak tersedia.

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects*. World Bank. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 25 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a3c7e57-42bc-83ec-b637-b98bfb664148>